Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

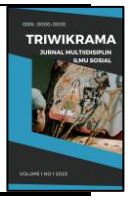

PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN STUDI TATA KELOLA RESPONSIF GENDER DI KELURAHAN PAJANG, KOTA TANGERANG

Galuh Alfiana Hastuti[1], Nur Wahidilah Salecha[2], Audizia Hani Rizqi[3]
[1,2,3] Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

E-mail:
galuhalfh21@gmail.com
nurwahidillah@gmail.com
audiziahani26@gmail.com

Kata Kunci: Peran perempuan, pengambilan keputusan, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan, partisipasi perempuan, Kelurahan Panjang.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dalam pengambilan keputusan serta mengidentifikasi bentuk kesetaraan gender yang diterapkan dalam tata kelola pemerintahan di Kelurahan Panjang, Kota Tangerang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas aparatur Kelurahan Panjang yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam forum diskusi maupun musyawarah yang menjadi dasar pengambilan keputusan di lingkungan kelurahan. Selain itu, perempuan juga memperoleh kesempatan untuk menduduki jabatan strategis, yang tercermin dari keberadaan perempuan sebagai Kepala Seksi Tata Pemerintahan. Mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif dan kolektif memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam proses perumusan kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender telah diimplementasikan dengan cukup baik dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Panjang. Keterlibatan perempuan tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan hak kesetaraan, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Gender Mainstreaming (PUG) in governance at the Benda District Office in Tangerang City. The primary focus of the study is to examine the extent to which decision-making and policymaking processes in the employment sector have integrated the needs, experiences, and perspectives of men and women equally and fairly. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation studies related to the Gender Analysis Pathway (GAP) and the Gender Budget Statement (GBS). Effectiveness analysis is measured through four main indicators: access, participation, control, and perceived benefits for both genders in employment programs, such as job training and

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

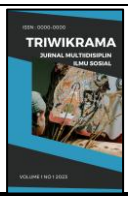

placement. The results indicate that despite the availability of regulatory instruments, the effectiveness of gender-responsive decision-making still faces challenges in terms of human resource capacity and a thorough understanding of the urgency of PUG. However, the Tangerang City Manpower Office's efforts in providing inclusive training programs have shown a positive trend in reducing the gap in employment opportunities at the local level. This study recommends the need for institutional strengthening and synchronization of genderdisaggregated data to create more inclusive and accountable governance.

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) secara fundamental menuntut adanya inklusivitas yang bermakna dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan publik. Salah satu pilar utama dalam menciptakan keadilan sosial yang berkesinambungan adalah implementasi strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Sebagai sebuah strategi sistematis, PUG berfungsi untuk memastikan bahwa aspirasi, kebutuhan, kekhasan, dan pengalaman hidup baik laki-laki maupun perempuan menjadi dimensi integral dalam desain, implementasi, penganggaran, serta pemantauan kebijakan di seluruh instansi pemerintah (siregar maysarah, 2022).

Di Indonesia, mandat normatif ini telah diperkuat melalui regulasi nasional sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Namun, efektivitas implementasinya di tingkat daerah masih menunjukkan tantangan yang dinamis, terutama dalam menerjemahkan kebijakan makro menjadi aksi responsif gender yang konkret melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) (Hap Sari & Amanatun Suryani, 2023).

Di banyak pemerintah daerah, integrasi PUG seringkali masih terjebak pada pemenuhan administratif (*tokenism*) alih-alih transformasi substansial. Hal ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun instrumen teknis seperti *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS), serta masih kuatnya bias budaya patriarki di lingkungan birokrasi Akibatnya, alokasi anggaran yang benar-benar menyasar pada pengentasan kesenjangan gender di daerah masih relatif minim. Oleh karena itu, keberhasilan PUG di tingkat lokal sangat bergantung pada komitmen politik kepala daerah, penguatan kelembagaan *Pokja PUG*, serta pengawasan yang konsisten dari masyarakat sipil (Ismail dkk., t.t.)

Efektivitas keputusan yang peka gender sangat tergantung pada seberapa baik birokrasi dapat mengenali kesenjangan gender dengan tepat melalui pengumpulan dan pemanfaatan data yang terpisah (Muhartono, s. 2020) Proses pengambilan keputusan yang peka tidak seharusnya hanya berhenti pada pencapaian angka partisipasi formal (akses), tetapi harus melibatkan kontrol dan keuntungan dalam rangka menghancurkan rintangan struktural yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang rentan.

Dalam dunia kerja, isu gender sering kali muncul dalam bentuk ketidaksetaraan akses terhadap pelatihan kerja, pemisahan pasar kerja baik horizontal maupun vertikal, serta perbedaan tingkat gaji (gender wage gap) Dinamika ini menempatkan Dinas Ketenagakerjaan dalam posisi penting sebagai pelopor untuk memastikan bahwa pasar kerja di tingkat lokal dapat inklusif dan bebas dari diskriminasi (Mayasari dkk., 2025).

Dalam konteks lokal yang dinamis ini, penting untuk menguji secara empiris apakah keputusan-keputusan publik yang diambil oleh otoritas Kecamatan Benda telah mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan secara adil (*gender-responsive*), atau justru masih terjebak dalam kebijakan netral gender (*gender-neutral*) yang secara tidak sadar mengabaikan ketimpangan struktural yang telah mengakar.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

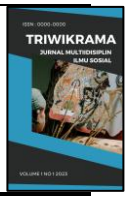

Kelurahan Pajang Kota Tangerang sebagai salah satu wilayah administratif dengan dinamika sosial yang beragam tentu menghadapi tantangan tersendiri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif gender. Perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, serta tingkat partisipasi masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi bagaimana kebijakan dirancang dan diimplementasikan. Dalam konteks ini, penting untuk melihat apakah kebijakan yang diambil telah mempertimbangkan kebutuhan perempuan secara adil, atau justru masih bersifat netral gender yang berpotensi mengabaikan ketimpangan yang ada.

Efektivitas pengambilan keputusan responsif gender juga berkaitan erat dengan komitmen kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta dukungan data yang memadai. Tanpa adanya ketiga aspek tersebut, pengarusutamaan gender berisiko hanya menjadi formalitas administratif tanpa memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan perempuan di tingkat lokal.

Perempuan memiliki perspektif dan pengalaman yang berbeda dalam melihat berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara lebih adil dan menyeluruh. Kehadiran perempuan dalam struktur pemerintahan tidak hanya mencerminkan prinsip kesetaraan gender, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik melalui sudut pandang yang lebih beragam. Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam tata kelola pemerintahan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengarusutamaan gender. Keterlibatan perempuan tidak hanya dilihat dari kehadiran secara kuantitatif, tetapi juga dari sejauh mana suara dan kepentingannya benar-benar diakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan. Dalam praktiknya, masih terdapat kecenderungan bahwa perempuan belum sepenuhnya memiliki ruang yang setara dalam proses deliberasi, baik karena faktor budaya, struktur organisasi, maupun keterbatasan akses terhadap informasi.

Selain partisipasi, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan juga berperan dalam mendukung kebijakan yang responsif gender. Pemerintahan yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat, khususnya kelompok perempuan, akan lebih mampu merumuskan kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, mekanisme seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) serta layanan aspirasi masyarakat menjadi sarana penting untuk mengidentifikasi kebutuhan berbasis gender secara langsung dari masyarakat.

Tidak kalah penting, keberadaan program-program pemberdayaan perempuan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah juga perlu dievaluasi dari perspektif efektivitasnya. Program yang dirancang seharusnya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta posisi tawar perempuan di masyarakat. Dengan demikian, analisis terhadap efektivitas pengambilan keputusan responsif gender tidak hanya melihat pada proses kebijakan, tetapi juga pada output dan outcome yang dihasilkan bagi kelompok sasaran. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengarusutamaan gender dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengambilan keputusan yang responsif gender di Kecamatan Benda Kota Tangerang.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

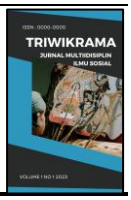

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan pada tata kelola pemerintahan di Kelurahan Pajang, Kota Tangerang. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh selama proses penelitian.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kelurahan Pajang, Kota Tangerang. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kelurahan Pajang memiliki keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai implementasi kesetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan kelurahan. Informan utama dalam penelitian ini adalah Sekretaris Kelurahan Pajang, sedangkan informan pendukung terdiri atas beberapa pegawai yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program kerja.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai peran perempuan dalam pengambilan keputusan, kesempatan menduduki jabatan strategis, serta bentuk penerapan kesetaraan gender di lingkungan kelurahan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi lingkungan kerja, pola interaksi antarpegawai, serta mekanisme pengambilan keputusan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui dokumen resmi, struktur organisasi, arsip, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga informasi yang diperoleh dapat diuji kebenarannya dan menghasilkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Panjang, diketahui bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan kelurahan. Narasumber menjelaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan maupun pelaksanaan program kerja tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan kelayakan dan relevansi usulan yang diberikan. Hal ini menunjukkan adanya prinsip kesetaraan gender dalam tata kelola pemerintahan di Kelurahan Panjang, di mana perempuan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam proses diskusi organisasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peran perempuan tidak hanya dipandang sebagai pelengkap dalam struktur birokrasi, tetapi juga sebagai bagian penting dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Dari aspek sumber daya manusia, Kelurahan Panjang memiliki total sembilan pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

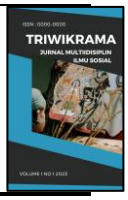

(PPPK), dan tenaga *outsourcing*. Dari jumlah tersebut, terdapat tiga pegawai perempuan yang aktif menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Salah satu pegawai perempuan bahkan menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Tata Pemerintahan, sedangkan dua lainnya bertugas sebagai operator administrasi. Keberadaan perempuan pada posisi struktural menunjukkan bahwa kesempatan untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan kelurahan terbuka bagi perempuan. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya penerapan kesetaraan dalam distribusi jabatan serta pengakuan terhadap kompetensi perempuan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan dinilai setara dengan pegawai laki-laki. Informan menegaskan bahwa keputusan organisasi pada umumnya dihasilkan melalui mekanisme diskusi, koordinasi, dan *briefing* bersama yang melibatkan seluruh unsur pegawai. Dengan demikian, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, serta berpartisipasi dalam proses musyawarah sebelum keputusan akhir ditetapkan oleh pimpinan. Meskipun keputusan tertentu yang berkaitan dengan kewenangan dan otoritas tetap berada di tangan lurah sebagai pemimpin tertinggi, proses penyusunannya tetap melibatkan partisipasi seluruh pegawai, termasuk perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pengambilan keputusan di Kelurahan Panjang mengedepankan prinsip partisipatif dan kolektif.

Struktur organisasi Kelurahan Panjang yang relatif sederhana juga mendukung terciptanya komunikasi yang lebih terbuka antara pimpinan dan pegawai. Struktur tersebut terdiri atas lurah, sekretaris kelurahan, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, serta Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat. Dalam struktur ini, perempuan menempati salah satu jabatan strategis, yaitu Kepala Seksi Tata Pemerintahan. Keterlibatan perempuan pada posisi tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan di Kelurahan Panjang telah berjalan cukup baik dan menunjukkan adanya penerapan prinsip kesetaraan *gender* dalam tata kelola pemerintahan *local*

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep partisipasi gender dalam administrasi publik yang menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Kehadiran perempuan dalam struktur organisasi serta keterlibatannya dalam forum diskusi dan musyawarah memberikan perspektif yang lebih beragam dalam penyusunan kebijakan. Dengan demikian, partisipasi perempuan di Kelurahan Panjang tidak hanya mencerminkan pemenuhan prinsip kesetaraan, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan di Kelurahan Panjang, Kota Tangerang, telah menunjukkan perkembangan yang positif. Perempuan tidak hanya hadir sebagai bagian dari struktur organisasi pemerintahan, tetapi juga memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam berbagai proses diskusi, koordinasi, dan musyawarah yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Kesetaraan tersebut terlihat dari adanya ruang yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, serta berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja di lingkungan kelurahan.

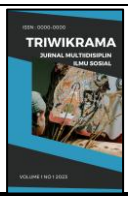

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis menjadi bukti bahwa kemampuan dan kompetensi perempuan telah mendapatkan pengakuan dalam sistem pemerintahan lokal. Kehadiran perempuan pada posisi Kepala Seksi Tata Pemerintahan memperlihatkan bahwa akses terhadap jabatan struktural tidak lagi didasarkan pada perbedaan gender, melainkan pada kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Kondisi ini mencerminkan adanya penerapan prinsip kesetaraan gender yang cukup baik dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Panjang.

Selain itu, mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif dan kolektif turut mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif. Keterlibatan perempuan dalam proses tersebut memberikan perspektif yang lebih beragam sehingga mampu memperkaya kualitas kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, partisipasi perempuan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan hak kesetaraan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, upaya untuk memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan perlu terus dilakukan. Peningkatan kapasitas, penguatan kepemimpinan perempuan, serta penciptaan lingkungan kerja yang semakin mendukung kesetaraan gender menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perempuan dapat berkontribusi secara optimal dalam setiap proses pemerintahan. Oleh karena itu, komitmen seluruh pihak dalam menjaga dan mengembangkan budaya kerja yang inklusif perlu terus ditingkatkan agar prinsip kesetaraan gender tidak hanya menjadi nilai normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Pada akhirnya, keterlibatan perempuan yang lebih luas dan bermakna diharapkan mampu mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih adil, efektif, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Hap Sari, R., & Amanatun Suryani, D. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Implementation of Gender Mainstreaming Policies in The Special Regional Government of Yogyakarta*. *18*(1), 12–34. https://doi.org/10.20961/sp.v18i1.64885

Ismail, K., Yulyana, E., & Priyanti, E. (t.t.). PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK (Studi Implementasi Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang). *Jurnal MODERAT*, *6*(4).

Mayasari, A. D., Dama, M., & Situmorang, L. (2025). Menuju Birokrasi Inklusif: Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender di Sektor Publik. *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, *2*(2), 157–169. https://doi.org/10.69875/djosse.v2i2.197

siregar maysarah, azilah. (2022). *IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM*.

Siswanto Muhartono Universitas Pawyatan Daha Kediri, D. (2020). *Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri The importance of gender mainstreaming regulations in regional development in Kediri Regency*.

Hidaya, N., & Asri, A. (2023). *Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Kebijakan di Era Otonomi Daerah Kabupaten Sorong*. Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik (FAKSI), 9(1).

Dewi, A. P., & Suryani, D. A. (2025). *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan di Kabupaten Gunungkidul*. Journal of Public Administration and Local Governance, 9(1).